



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN III TAHUN 2025

**PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan hidayah-NYA sehingga Laporan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Brondong Triwulan III Tahun Anggaran 2025 dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran program dan indikator kinerja PPN Brondong Tahun Anggaran 2025.

Penyusunan Laporan Kinerja PPN Brondong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang memiliki manfaat sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi kepada masyarakat, serta sebagai alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja pegawai di lingkungan PPN Brondong. Kinerja PPN Brondong diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh pegawai di lingkungan PPN Brondong dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.



Lamongan, 15 Oktober 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan
Nusantara Brondong

Nur Alimin

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas Dan Fungsi.....	2
1.3. Struktur Organisasi dan SDM PPN Brondong	3
1.4. Permasalahan.....	5
1.5. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025	7
2.2. Rencana Aksi Penetapan Kinerja.....	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Realisasi Anggaran	37
BAB IV PENUTUP	38
LAMPIRAN	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin.....	4
Tabel 2 Target Kinerja PPN Brondong Tahun 2025	7
Tabel 3 Alokasi Anggaran PPN Brondong Tahun 2025	8
<i>Tabel 4 Rencana Aksi PPN Brondong Tahun 2025.....</i>	<i>10</i>
Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Triwulan III Tahun 2025	13
Tabel 6 Jenis Penerimaan PNPB di PPN Brondong.....	14
Tabel 7 Target dan Realisasi Penerimaan PNPB Non SDA Triwulan III Tahun 2025	15
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Penerimaan PNPB Non SDA dengan Periode Sebelumnya	15
Tabel 9 Target dan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap.....	16
Tabel 10 Perbandingan Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap dengan Periode Sebelumnya	16
Tabel 11 Target dan Realisasi Tingkat Kinerja PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025	19
Tabel 12 Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja PPN Brondong dengan Periode Sebelumnya	19
Tabel 13 Target dan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025	22
Tabel 14 Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan	23
Tabel 15 Target dan Realisasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan.....	25
Tabel 16 Perbandingan Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Lingkungan.....	25
Tabel 17 Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk.....	28
Tabel 18 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan periode sebelumnya	29
Tabel 19 Realisasi Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Tahun 2025.....	32
Tabel 20 Target dan Realisasi Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025	32
<i>Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di PPN Brondong dengan periode sebelumnya</i>	<i>32</i>
Tabel 22 Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025	36
Tabel 23 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan SKM	36
Tabel 24 Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025	37

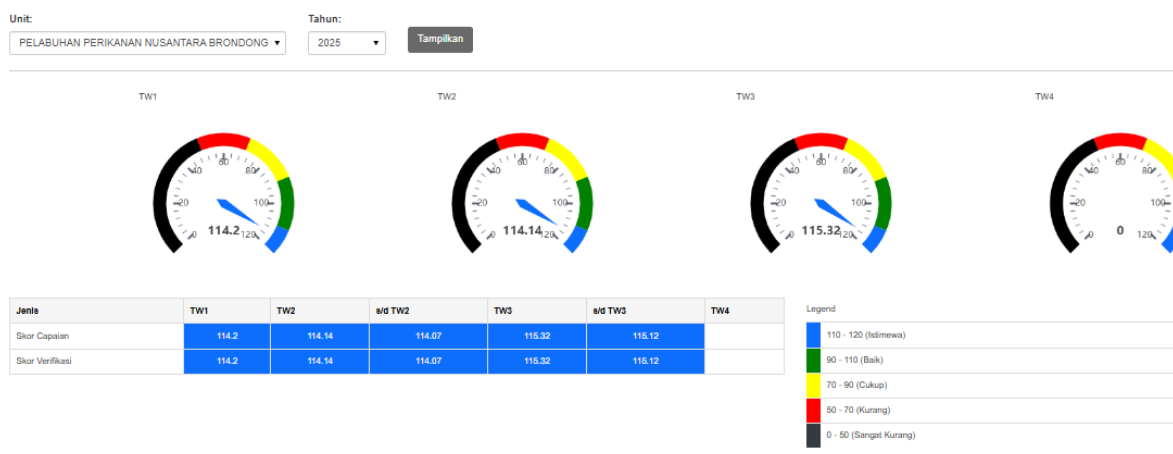
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tampilan Dashboard Kinerja PPN Brondong.....	v
Gambar 2 Struktur Organisasi PPN Brondong 2025	3
Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan	4
Gambar 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	4
Gambar 5 Grafik Realisasi PNBPN Non SDA Per Bulan di PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025.....	15
Gambar 6 Grafik Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap Per Bulan	16
Gambar 7 Grafik Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan III Tahun 2025	19
Gambar 8 Grafik Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Per Bulan	22
Gambar 9 Data IK Selaraskan Lingkup DJPT Triwulan III Tahun 2025	23
Gambar 10 Grafik Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan di PPN Brondong Per Bulan	25
Gambar 11 Dashboard Aplikasi SIDAK.....	28
Gambar 12 Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan III Tahun 2025 Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.....	36

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong sebagai Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas umum pemerintahan di pelabuhan perikanan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap.

Pada Tahun 2025, PPN Brondong mendapatkan alokasi awal anggaran sebesar Rp. 15.058.405.000,- dengan realisasi belanja sampai dengan Triwulan III sebesar Rp. 9.584.014.653,- atau 63.65%. Secara kinerja PPN Brondong mendapatkan Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 115,32 kategori **Istimewa** yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Tampilan Dashboard Kinerja PPN Brondong

Ketercapaian Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 115,32 didukung oleh tercapainya 8 capaian indikator kinerja meliputi :

- IK 1 - Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp. Juta)
- IK 2 - Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)
- IK 4 - Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)
- IK 7 - Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

- IK 8 - Kapal Perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)
- IK 11 - Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)
- IK 14 - Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)
- IK 18 - Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Pengukuran kinerja berbasis BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada capaian indicator kinerja utama (pencapaian output) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis (pencapaian outcome). Capaian kinerja PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025 dipengaruhi oleh adanya perencanaan, pelaksanaan kegiatan yang melibatkan seluruh komponen di PPN Brondong serta monitoring dan evaluasi secara berkala. Dalam meningkatkan kinerja kedepan dipandang perlu ketersediaan SDM yang berkompeten dan sesuai dengan beban kerja di PPN Brondong, serta ketersediaan sarana dan prasana yang sesuai dengan kebutuhan kinerja.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong merupakan salah satu unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan perikanan tangkap, PPN Brondong melaksanakan 3 (tiga) kegiatan, yaitu :

1. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan.
2. Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara akuntabel sesuai dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; dan
2. Menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Wujud pelaporan kinerja dimaksud adalah Laporan Kinerja PPN Brondong yang disusun setiap tahun. Berkaitan dengan hal tersebut, Laporan Kinerja PPN Brondong

Tahun 2025 disusun untuk mengukur pencapaian indikator kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja PPN Brondong Tahun 2025 dalam mewujudkan misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja ini adalah salah satu bentuk media pertanggungjawaban kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja dan anggaran yang telah dialokasikan terhadap kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab bisa diwujudkan.

1.2. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 66/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap, tugas PPN Brondong adalah melaksanakan pengelolaan dan pelayanan pemanfaatan sumber daya ikan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut PPN Brondong menyelenggarakan fungsinya:

1. Penyusunan, pemantuan, dan evaluasi rencana program dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelabuhan perikanan;
2. Pelaksanaan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan;
3. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
4. Pelaksanaan pemeriksaan *Log Book* penangkapan ikan;
5. Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar;
6. Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan;
7. Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
8. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana;
9. Pelaksanaan fasilitasi penyuluhan, pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan, perkarantinaan ikan, publikasi hasil penelitian, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu serta pengolahan, pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
10. Pelayanan jasa, pemanfaatan lahan dan fasilitas usaha;
11. Pelaksanaan pengumpulan data, informasi dan publikasi;
12. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penerbitan Sertifikat Cara Penanganan Ikan yang Baik;

13. Pelaksanaan inspeksi pengendalian mutu hasil perikanan pada kegiatan penangkapan ikan;
14. Pelaksanaan pengendalian lingkungan di pelabuhan perikanan;
15. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.3. Struktur Organisasi dan SDM PPN Brondong

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi maka disusun struktur organisasi Pelabuhan Perikanan Nusantara, sebagai berikut :

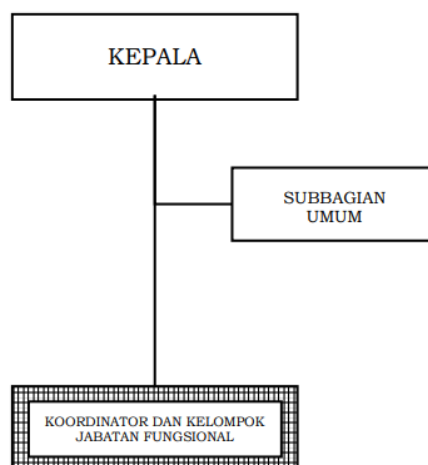
1.3.1. Subbagian Umum

Melakukan urusan hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, dan rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

1.3.2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan masing-masing. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Perikanan Tangkap. Tugas koordinator tersebut adalah mengkoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.

STRUKTUR ORGANISASI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA

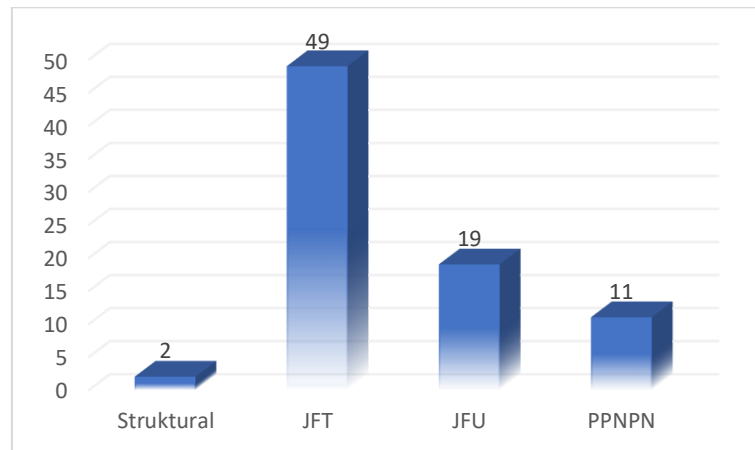


Gambar 2 Struktur Organisasi PPN Brondong 2025

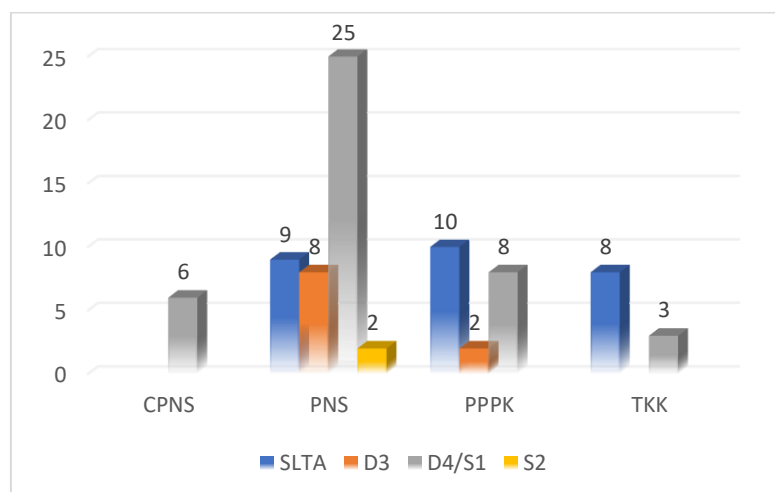
PPN Brondong di dukung oleh 81 orang pegawai yang terdiri atas PNS 44 orang (54,3%), CPNS 6 orang (7,4%), PPPK 20 orang (24,7%) dan PPNPN 11 orang (13,6%). Komposisi pegawai di PPN Brondong pada Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Status	Golongan/Jenis Kelamin								Jumlah		
	I		II		III		IV		L	P	L+P
	L	P	L	P	L	P	L	P			
CPNS	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	6
PNS	-	-	6	3	25	9	1	-	32	12	44
PPPK	-	-	9	3	5	3	-	-	14	6	20
PPNPN	11	-	-	-	-	-	-	-	11	-	11
Jumlah	11	-	15	6	28	17	1	-	-	-	81



Gambar 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Gambar 4 Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.4. Permasalahan

Secara umum perikanan tangkap memiliki permasalahan yang cukup kompleks yang disebabkan oleh banyak factor dan juga sensitive terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Permasalahan dalam pembangunan perikanan tangkap mencakup berbagai kelemahan yang terdapat di internal sistem perikanan tangkap maupun berbagai ancaman yang berasal dari luar sistem perikanan tangkap. Permasalahan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) permasalahan utama, yakni sebagai berikut:

1. **Kapasitas nelayan;** Belum optimalnya kemampuan nelayan dalam menerapkan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan ramah lingkungan serta minimnya pengetahuan tentang cara penanganan ikan yang baik di atas kapal perikanan bagi sebagian nelayan.
2. **Kesejahteraan nelayan:** Belum terpenuhinya kebutuhan dasar bagi sebagian keluarga nelayan yang disebabkan rendahnya kemampuan nelayan dalam pengelolaan keuangan dalam merespon kerentanan usaha penangkapan ikan.
3. **Mindset masyarakat perikanan tangkap;** Bagi sebagian nelayan, usaha penangkapan ikan masih terbatas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan jangka menengah, belum sampai sepenuhnya pada upaya mendukung industrialisasi ataupun menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan.
4. **Sarana prasarana usaha penangkapan ikan;** Belum optimalnya pengembangan infrastruktur dan integrasi konektivitas sistem informasi antar pelabuhan perikanan, serta; masih rendahnya produktivitas armada perikanan, termasuk dalam hal pemenuhan kriteria laik tangkap dan laik simpan, tingkat pendataan kapal dan alat penangkapan ikan yang reliable, serta penyerapan teknologi penangkapan ikan yang produktif dan efisien.
5. **Konektivitas analisis dan pemantauan pemanfaatan usaha;** Belum optimalnya konektivitas pemanfaatan usaha khususnya pada skala nelayan kecil, integrasi perizinan usaha antara pusatdaerah, maupun intensifikasi penggunaan sistem IT dalam pelaporan usaha.

1.5. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja PPN Brondong Tahun 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Adapun sistematika laporan sebagai berikut:

- 1) **Ikhtisar Eksekutif**, pada bagian ini berisi ringkasan capaian kinerja PPN Brondong Tahun 2025.
- 2) **Bab I Pendahuluan**, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
- 3) **Bab II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- 4) **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran.
- 5) **Bab IV Penutup**, pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.
- 6) **Bab V Lampiran**, berisi Perjajian Kinerja, penghargaan yang diraih dan dokumen lainnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2025

Penetapan kinerja pada Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dirumuskan dalam dokumen perjanjian kinerja yang berisi penugasan dari Direktur Jenderal Perikanan Tangkap kepada Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong untuk melaksanakan program dan kegiatan pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Perumusan perjanjian kinerja tahun 2025 dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Oleh karena itu indikator-indikator kinerja dan target tahunan yang digunakan dalam perjanjian kinerja mengacu pada indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. Adapun Indikator Kinerja Utama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Tahun 2025 adalah sebagaimana pada tabel 2.

Tabel 2 Target Kinerja PPN Brondong Tahun 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Nilai PNBP sektor perikanan tangkap meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	1	Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp.Juta)	2.210,42
2	Produktivitas perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong meningkat	2	Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	57.000
3	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang optimal dan bertanggungjawab	3	Persentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	100
		4	Tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	87
		5	Tingkat pelayanan kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	95
		6	Persentase pengendalian pengembangan fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	86
		7	Nilai pengendalian lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	30,1
4	Pengelolaan awak kapal perikanan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	8	Kapal perikanan izin daerah yang memenuhi ketentuan (Kapal)	618
		9	Tingkat pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan	0,26
5	Terwujudnya layanan dukungan manajerial yang Baik di lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong	10	Nilai PM pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	75,5
		11	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	85

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
		12	Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88
		13	Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	87
		14	Persentase Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	76
		15	Persentase pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	81
		16	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	92
		17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	71,5
		18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	88,5

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3 Alokasi Anggaran PPN Brondong Tahun 2025

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1,086,708,000
2	Pengelolaan Sumber Daya Ikan	38,689,000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13,933,008,000
	Total Anggaran Tahun 2025	15,058,405,000

2.2. Rencana Aksi Penetapan Kinerja

Rencana aksi merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai target-target kinerja yang telah disusun dan ditetapkan. Tujuan penyusunan rencana aksi sebagai alat monitor secara berkala terhadap pencapaian indikator output kinerja dan anggaran. Rencana aksi disusun hanya untuk menjabarkan IKU Perspektif *Internal Process* dan *Learning and Growth* yang di sandingkan dengan indikator kegiatan pada pencapaian setiap bulannya sehingga didapat persentase pencapaian secara berkala. Sebagaimana pada tabel perbandingan capaian IKU dan Anggaran dibawah ini, sebagai berikut ini (Tabel 4):

[illegible]

[illegible]

Berdasarkan capaian kinerja diatas maka dilakukan analisa terhadap pencapaian tersebut sehingga dapat memberikan data yang komprehensif sebagai bahan pengambilan kebijakan untuk kinerja organisasi ditahun berikutnya. Berikut ini adalah capaian dari masing – masing Indikator Kinerja Utama (IKU) PPN Brondong Tahun 2025:

S.01 Nilai PNBP Sektor Perikanan Tangkap Meningkat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 01.1. Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) merupakan pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada PPN Brondong terdapat 2 (dua) jenis penerimaan yaitu pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi dan pendapatan jasa pelabuhan perikanan.

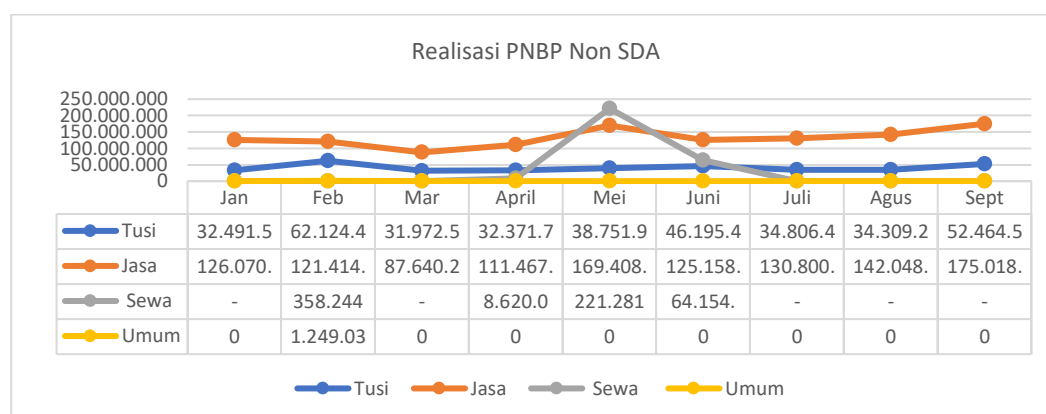
Tabel 6 Jenis Penerimaan PNBP di PPN Brondong

PNBP Sarana Dan Prasarana	PNBP Jasa Pelabuhan Perikanan
1. Penggunaan Tanah dalam Rangka Tusi Pelabuhan Perikanan Klaster 1; 2. Bangunan Permanen; 3. Pemeliharaan Prasarana; 4. Penumpukan Barang Terbuka Tidak Beratap; 5. Ruang Pertemuan/Aula AC Kapasitas 51 s.d 100 Orang; 6. Pelayanan Penggunaan Ruang Pendingin; 7. Penggunaan ABF (Frezeer); 8. Pelayanan Tangki Air dan Instalasinya; dan 9. Pelayanan Transportasi - Crane Truck.	1. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>30 - 100 GT); 2. Pelayanan Tambat Kapal Perikanan (>5 - 30 GT); 3. Pemakaian Listrik yang Bersumber dari Daya milik PLN melalui Instalasi milik Pelabuhan Perikanan; 4. Pelayanan Pengadaan Air Berasal dari PDAM yang Dialirkan Melalui Pipa Dermaga/TPI; 5. Pelayanan bengkel; 6. Pelayanan jasa pas masuk harian; 7. Pelayanan jasa pas masuk berlangganan; dan 8. Pelayanan jasa kebersihan kolam pelabuhan, pertokoan/perkantorn, rumah makan kios, dan bangunan permanen tertutup

Pengukuran capaian indikator kinerja “Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” sesuai dengan manual IKU yaitu merupakan nilai PNBP non SDA dari sektor Perikanan Tangkap di tahun berjalan sesuai PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Capaian Penerimaan PNBP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan III Tahun 2025 sebesar Rp. 1.854.637.321,-.

Tabel 7 Target dan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan III			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Penerimaan PNBP Non SDA di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Rp.Juta)	2.210	1.500	1.854	123,64	84



Gambar 5 Grafik Realisasi PNBP Non SDA Per Bulan di PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025

Tabel 8 Perbandingan Realisasi Penerimaan PNBP Non SDA dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Rp. Juta)		Selisih (+/-) (Rp. Juta)	%
TW III 2024	TW III 2025		
1.821	1.854	33	2

Realisasi PNBP Non SDA pada PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025 melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 1.500 Juta Rupiah dengan realisasi 1.854 Juta Rupiah atau 123,64% dan sebesar 84% dari target Tahun 2025 sebesar 2,210 Juta Rupiah. Bila dibandingkan dengan realisasi Triwulan III Tahun 2024 yaitu sebesar 1.821 Juta Rupiah maka capaian PNBP Non SDA pada Triwulan III Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 33 Juta Rupiah atau 2%.

Kenaikan capaian PNBP tahun 2025 dibandingkan tahun 2024 disebabkan oleh adanya potensi peningkatan penerimaan pada tambat labuh, pas masuk harian, dan sewa tanah dan bangunan (PP 27). Selanjutnya, pada penerimaan pas masuk harian telah menggunakan sistem portal otomatis sehingga memudahkan petugas dalam penarikan PNBP Non SDA. Diharapkan untuk bulan-bulan berikutnya dapat konsisten dalam pendapatan PNBP nya minimal sama dengan rata-rata per bulan atau bahkan dapat melampaui asumsi target rata-rata per bulan.

Dalam meningkatkan kembali realisasi PNBP Non SDA di PPN Brondong pada periode berikutnya, diperlukan menjaga konsistensi dan integritas dalam pemungutan PNBP.

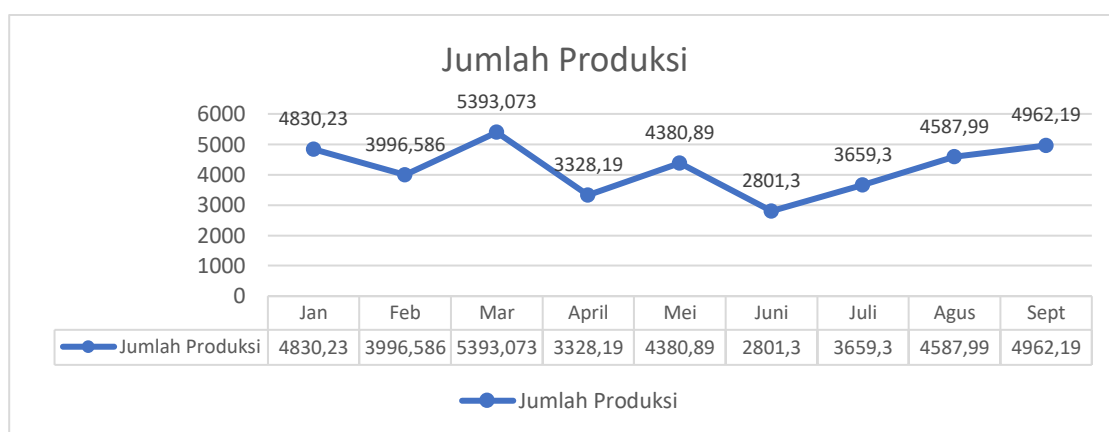
S.02 Produktivitas Perikanan Tangkap Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Meningkat

IKS 02.1. Volume produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)

Produksi perikanan tangkap mencakup hasil penangkapan ikan, binatang air, dan tanaman air dari sumber perikanan alami yang bukan milik perorangan. Hasil produksi, baik yang dijual maupun yang dibayar sebagai upah, berasal dari kapal penangkap ikan yang didaratkan di PPN Brondong. Proses pengumpulan data dilakukan oleh enumerator setiap hari dengan mencatat hasil tangkapan, yang kemudian diolah oleh petugas untuk menghasilkan data volume produksi yang divalidasi. Kinerja diukur dengan membandingkan realisasi dengan target; pencapaian dinyatakan berhasil jika realisasi sama dengan atau lebih besar dari target. Pada Triwulan III Tahun 2025, volume produksi perikanan tangkap di PPN Brondong mencapai 37.984,80 ton.

Tabel 9 Target dan Realisasi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap di PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan III			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Volume Produksi Perikanan Tangkap di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Ton)	57.000	35.000	37.984,80	108,53	67



Gambar 6 Grafik Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap Per Bulan

Tabel 10 Perbandingan Realisasi Volume Produksi Perikanan Tangkap dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Ton)		Selisih (+/-) (Ton)	%
TW III 2024	TW III 2025		
39.605,8	37.984,80	-1.621	-4

Berdasarkan tabel dan grafik diatas diketahui bahwa volume produksi

perikanan tangkap di PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025 sebesar 37.984,80 ton atau 108,53% dari target Triwulan III sebesar 35.000 ton dan sebesar 67% dari target Tahun 2025 sebesar 57.000 ton. Bila dibandingkan dengan realisasi Triwulan III Tahun 2024 yaitu sebesar 39.605,8 ton maka capaian volume produksi perikanan tangkap Triwulan III Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -4% atau -1.621 ton.

Hal ini disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah unit kunjungan kapal bongkar mulai dari triwulan I sebanyak 7 kapal/hari, triwulan II sebanyak 11 kapal/hari dan pada triwulan III tahun 2025 sebanyak 19 kapal/hari. Selain itu rata-rata produksi yang dihasilkan sampai Triwulan III per harinya mencapai 140,68 ton/hari atau lebih tinggi dari rata-rata produksi harian target Triwulan III sebanyak 129,63 ton/hari.

Permasalahan yang ada adalah rata-rata produksi yang didaratkan di PPN Brondong sampai triwulan III sebesar 140,68 ton/hari dan masih berada di bawah rata-rata produksi harian target tahunan sebesar 158,33 ton/hari. Menurunnya jumlah tangkapan nelayan dan semakin lamanya waktu trip penangkapan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menjadi indikasi adanya penurunan produktivitas sumber daya ikan serta efisiensi operasional nelayan. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan musim dan pola migrasi ikan, meningkatnya tekanan penangkapan di wilayah tertentu, serta keterbatasan teknologi dan peralatan tangkap yang dimiliki nelayan.

Dalam rangka meningkatkan akurasi pendataan produksi perikanan tangkap di PPN Brondong perlu dilakukan monitoring dan evaluasi jumlah produksi yang didaratkan di PPN Brondong setiap harinya, optimalisasi sistem pendataan produksi ikan di PPN Brondong serta sosialisasi kepada nelayan mengenai efisiensi waktu trip dan keberlanjutan perikanan (teknik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan penggunaan alat tangkap ramah lingkungan).

S.03 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong yang Optimal dan Bertanggungjawab

IKS 03.1. Presentase permohonan pengusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Pelabuhan perikanan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor :08/MEN/2012 memiliki 2 fungsi yaitu sebagai fungsi pemerintahan dan fungsi pengusahaan. Fungsi pemerintahan pada pelabuhan perikanan yaitu melakukan

pembinaan dan pengolahan, melakukan pengumpulan data dan publikasi, melaksanakan fungsi karantina ikan, serta tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan, melaksanakan kegiatan kapal perikanan, melakukan publikasi hasil pelayanan sandar dan labuhn kapal perikanan dan kapal penelitian kelautan dan perikanan, melakukan pemantauan dan pengendalian lingkungan, dan melaksanakan kesyahbandaran, kepabeanan, dan/atau keimigrasian. Sedangkan fungsi perusahaan, pelabuhan sebagai pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan, bongkar muat ikan, pengolahan hasil perikanan, perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan, serta logistik dan perbekalan kapal pemasaran dan distribusi ikan, pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan, penyediaan jasa kelautan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

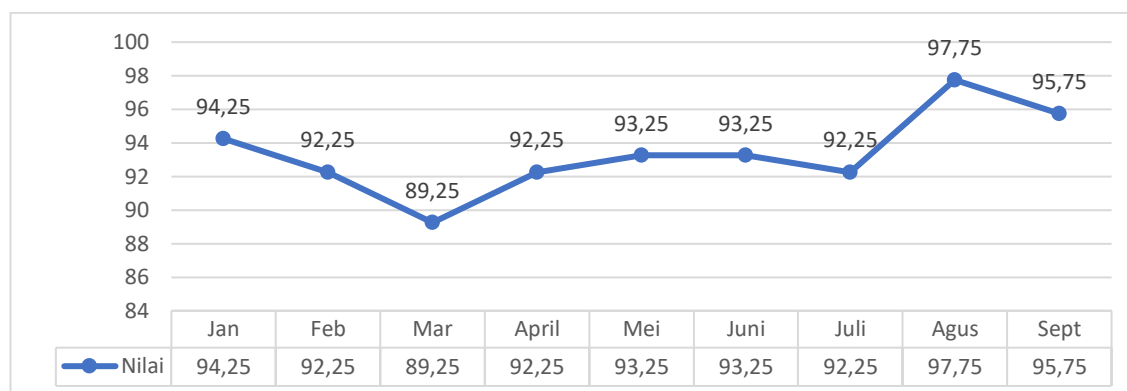
Dalam melakukan fungsi perusahaan terutama dalam pemanfaatan fasilitas dan lahan di Pelabuhan Perikanan perlu dilakukan proses analisa atau evaluasi terhadap permohonan perusahaan dalam rangka menghindari resiko yang terjadi kedepannya serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Triwulan III Tahun 2025 IKU "Presentase permohonan perusahaan yang dianalisa dan/atau dievaluasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)" tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode tahunan.

IKS 03. 2. Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Pelabuhan perikanan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu dalam pemenuhan fasilitas maupun pelayanan yang merupakan indikator/ parameter bagi keberhasilan capaian kinerja pelabuhan perikanan. Kinerja operasional pelabuhan perikanan berkaitan dengan segala aktivitas operasional yang ada di pelabuhan perikanan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan, pemasaran ikan dan pengawasan sumber daya ikan. Tingkat kinerja operasional pelabuhan perikanan didasarkan atas ketentuan kriteria teknis dan operasional sesuai dengan kelas pelabuhan perikanan yang terdiri : a) administrasi dan sistem informasi, b) fasilitas pelabuhan perikanan, c) pelayanan umum, dan d) investasi dan industri. Capaian indikator tingkat kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan III Tahun 2025 sebesar 95,25.

Tabel 11 Target dan Realisasi Tingkat Kinerja PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan III			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	87	87	95,25	109,5	109,5



Gambar 7 Grafik Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan III Tahun 2025

Tabel 12 Perbandingan Realisasi Tingkat Kinerja PPN Brondong dengan Periode Sebelumnya

Realisasi (Nilai)		Selisih (+/-) (Nilai)	%
TW III 2024	TW III 2025		
96,92	95,25	-1,67	-2

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa capaian IKU “Tingkat Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” Triwulan III Tahun 2025 sebesar 95,95 atau 109,5% dari target Triwulan III yang ditetapkan sebesar 87 dan sebesar 109,5% dari target tahun 2025 sebesar 87. Bila dibandingkan dengan realisasi Triwulan III Tahun 2024 yaitu sebesar 96,92 maka capaian tingkat kinerja PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar -1,67 atau -2%.

Hal ini disebabkan oleh beberapa komponen seperti kepatuhan nelayan untuk selalu melaporkan kedatangan kapal (STBLK) ketika mau melakukan pembongkaran ikan di PPN Brondong. Pada Triwulan I dan Triwulan II komponen kapal yang melapor kedatangan selalu dibawah 50 % dan pada triwulan III mencapai 90 %. Selain itu didukung oleh komponen-komponen lain seperti produksi, tambat labuh, anggaran, dan lain-lain yang selalu dijaga konsistensi capaiannya. Dari segi SDM realisasi tingkat kinerja pelabuhan didukung oleh: Data harian yang diinput oleh petugas entri dilakukan tepat waktu, Data bulanan yang diinput oleh petugas harus sudah dientri maksimal tanggal 4 setiap bulannya, yang artinya dilakukan sebelum waktu penarikan evaluasi oleh pusat dan dilakukan koordinasi kesesuaian data yang diinput antara data harian

dan data bulanan dengan aksi mengingatkan petugas untuk selalu menjaga koordinasi dan konsistensi dalam mengentri data di aplikasi PIPP tepat waktu selain itu kegiatan selalu dilakukan sesuai dengan target bulanan di masing-masing bagian.

Permasalahan kepatuhan nelayan terhadap perizinan kapal merupakan salah satu faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat kinerja pelabuhan. Rendahnya kesadaran dan kepatuhan dalam melengkapi dokumen perizinan, seperti SIPI dan SIKPI, menyebabkan banyak kapal belum dapat beroperasi secara legal, sehingga aktivitas bongkar muat dan pencatatan produksi ikan menjadi tidak optimal. Kondisi ini berdampak pada menurunnya realisasi PNBP serta penilaian kinerja pelayanan pelabuhan secara keseluruhan. Selain itu, ketidakpatuhan juga menimbulkan hambatan dalam proses pengawasan dan pendataan kapal, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas pelabuhan sebagai pusat kegiatan perikanan yang tertib, produktif, dan berkelanjutan

Rekomendasi dari permasalahan diatas adalah selalu mendorong kepada pelaku usaha/pemilik kapal untuk mengurus perizinannya, sehingga diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat pembinaan sekaligus pengawasan.

IKS 03. 3. Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang yaitu: (1) mengatur kedatangan kapal perikanan, (2) memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan, (3) menerbitkan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Perikanan, (4) mengatur keberangkatan kapal perikanan, (5) menerbitkan Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal Perikanan, (6) menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar, (7) memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan, (8) memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut, (9) memeriksa log book penangkapan ikan, (10) mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, (11) mengawasi pemanduan, (12) mengawasi pengisian bahan bakar, (13) mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, (14) melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan, (15) memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan,

(16) mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, (17) pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan, dan (18) memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

Dalam mengukur tingkat pelayanan kesyahbandaran di PPN Brondong pada Tahun 2025 melalui 3 (tiga) indikator pelayanan administrasi pada tugas dan wewenang syahbandar di pelabuhan perikanan yang meliputi: (1) jumlah persetujuan berlayar yang diterbitkan (bobot 40%), (2) jumlah surat tanda bukti lapor kedatangan (STBLK) yang diterbitkan (bobot 40%), dan (3) jumlah sertifikat hasil tangkapan ikan (SHTI) yang diterbitkan (bobot 20%). Pada triwulan III tahun 2025 IKU “Tingkat Pelayanan Kesyahbandaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode tahunan.

IKS 03.4. Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Pengembangan aktivitas atau usaha perikanan di pelabuhan perikanan sering tidak diimbangi dengan pengembangan fasilitasnya sehingga menghambat terlaksananya aktivitas pelabuhan perikanan secara optimal. Pengembangan fasilitas ini penting dilaksanakan agar aktivitas dapat dilakukan secara optimal. Sarana dan prasarana yang ada terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu fasilitas pokok yang merupakan fasilitas utama yang harus ada di Pelabuhan Perikanan, fasilitas fungsional untuk memberikan pelayanan dan manfaat langsung yang diperlukan untuk kegiatan operasional, dan fasilitas penunjang yang merupakan fasilitas tambahan yang diperlukan untuk mendukung kegiatan. Pada triwulan III tahun 2025 IKU “Presentase Pengendalian Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode tahunan.

IKS 03. 5. Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

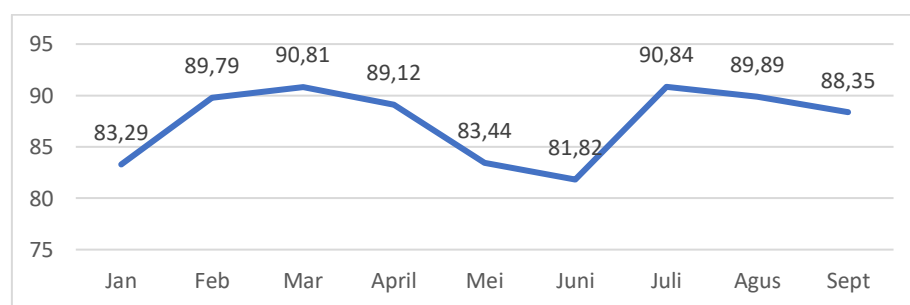
Dalam kegiatan operasional di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong dianggap perlu untuk ditinjau mengenai aspek lingkungan hidup sebagai kendali terhadap prakiraan terjadinya dampak pencemaran lingkungan dan perubahan di berbagai aspek, antara lain : aspek fisika-kimia (seperti : penurunan kualitas udara ambient, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air permukaan, penurunan

kualitas air laut, peningkatan air larian); aspek biologi (seperti : gangguan biota air); dan aspek sosial ekonomi dan budaya (seperti : gangguan lalu lintas darat, gangguan lalu lintas perairan, peningkatan kesempatan kerja dan peluang berusaha, perubahan persepsi masyarakat, timbulan limbah padat dan limbah bahan berbahaya dan beracun) yang pelaksanaan kegiatan pemantauan dan pengelolaan bekerjasama dengan pihak instansi atau pihak terkait yang dilakukan secara rutin dan periodik melaksanakan pemantauan langsung ke lapangan untuk menguji baku mutu kandungan parameter perihal kegiatan tersebut.

SELARASKAN merupakan sistem informasi berbasis WEB yang berfungsi sebagai alat monitoring tata kelola lingkungan di pelabuhan perikanan yang berisikan program lingkungan hingga hasil pencapaian kualitas lingkungan yang di update berkala dan dicantumkan dalam bentuk skore Pelabuhan. Pada Triwulan III Tahun 2025 skore PPN Brondong dalam pelaksanaan program lingkungan hingga pencapaian kualitas lingkungan sebesar 89,69 dengan kategori **Sangat Baik**.

Tabel 13 Target dan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan III			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	30,1	30,1	89,69	297,97	297,97



Gambar 8 Grafik Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Per Bulan

No.	Pelabuhan Perikanan	Juli	Agustus	September	Skor Kumulatif	Rata-rata	Kategori
8.	PPP Teluk Batang	92,46	91,17	89,83	273,46	91,15	SANGAT BAIK
9.	PPN Ternate	88,18	94,08	89,93	272,20	90,73	SANGAT BAIK
10.	PPS Bitung	95,55	91,64	83,47	270,66	90,22	SANGAT BAIK
11.	PPN Brondong	90,84	89,89	88,35	269,08	89,69	SANGAT BAIK
12.	PPN Palabuhanratu	83,04	92,07	90,20	265,31	88,44	SANGAT BAIK
13.	PPN Pengambangan	91,84	85,99	87,19	265,02	88,34	SANGAT BAIK
14.	PPN Tual	86,62	85,08	89,13	260,83	86,94	SANGAT BAIK
15.	PPS Belawan	87,57	86,40	84,43	258,41	86,14	SANGAT BAIK
16.	PPN Ambon	82,06	81,62	91,84	255,51	85,17	SANGAT BAIK
17.	PPS Nizam Zachman Jakarta	84,18	81,78	86,52	252,48	84,16	SANGAT BAIK
18.	PPS Kendari	78,05	84,33	88,06	250,44	83,48	SANGAT BAIK
19.	PPN Karangantu	90,66	71,73	85,02	247,41	82,47	SANGAT BAIK
20.	PPN Sungailiat	80,90	81,89	84,25	247,04	82,35	SANGAT BAIK
21.	PPN Pekalongan	82,89	83,02	80,55	246,46	82,15	SANGAT BAIK
22.	PPN Kwandang	67,59	64,34	81,57	213,50	71,167	BAIK

Gambar 9 Data IK Selaraskan Lingkup DJPT Triwulan III Tahun 2025

Tabel 14 Perbandingan Realisasi Nilai Pengendalian Lingkungan di PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025

Realisasi (Nilai)		Selisih (+/-) (Nilai)	%
TW III 2024	TW III 2025		
71,44	89,69	18,25	26

Berdasarkan table diatas, diketahui bahwa capaian IKU “Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” triwulan III tahun 2025 sebesar 89,69 atau 297,97% dari target yang ditetapkan sebesar 30,1 dan sebesar 297,97% dari target tahun 2025 sebesar 30,1. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 71,44 maka capaian triwulan III 2025 mengalami penurunan sebesar 18,25 atau 26%.

Ketercapaian Nilai Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong triwulan III tahun 2025 tidak terlepas dari adanya kesadaran pegawai serta stakeholder dalam menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan Pelabuhan

Perikanan Nusantara Brondong. Sebagai capaian penting, pada tahun 2024 PPN Brondong berhasil meraih sertifikasi ISO 14001 sehingga pencapaian nilai pengendalian lingkungan dapat lebih optimal.

Permasalahan dalam Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong pada Triwulan III adalah penyesuaian kegiatan karena adanya efisiensi anggaran.

Rekomendasi untuk Pengendalian Lingkungan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah menjaga konsistensi dan kesadaran pegawai serta stakeholder dalam menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan PPN Brondong

S.04 Pengelolaan Awak Kapal Perikanan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan Berkelanjutan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 04.1. Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)

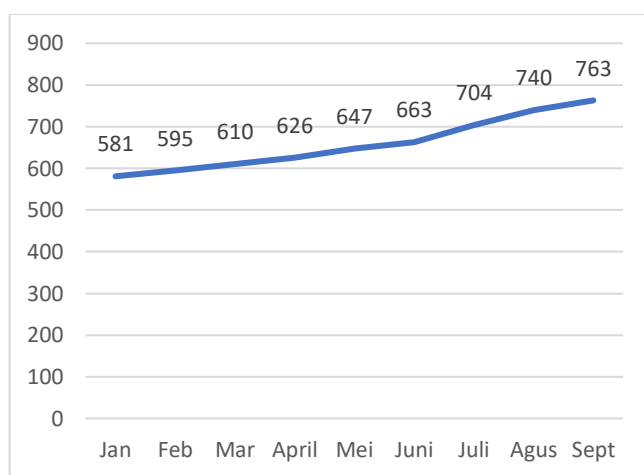
Dokumen kapal perikanan yang diterbitkan merupakan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) yaitu surat kapal yang menyatakan bahwa kapal perikanan memenuhi aspek kelaiklautan, kelaiktangkapan dan kelaiksimpanan dalam rangka keselamatan pelayaran. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) dengan menggelar gerai pelayanan di setiap daerah. Akselerasi ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan prima dalam memfasilitasi nelayan dan pelaku usaha kelautan dan perikanan.

Akselerasi KKP sebagai upaya pemerintah memberikan pelayanan prima diwujudkan dengan menerbitkan Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor B.578/MEN-KP/VII/2022 tentang Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan (SKKP) Dalam Masa Transisi, kebijakan tersebut didasarkan atas pertimbangan dengan pengalihan penerbitan Sertifikat Kelaikan dan Pengawasan Kapal Penangkap Ikan dan Sertifikat Keselamatan Barang dari Kementerian Perhubungan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawasan Kapal Perikanan. PPN Brondong sebagai salah satu UPT

pelaksana kebijakan pada Triwulan III Tahun 2025 telah menerbitkan sebanyak 663 dokumen SKKP sebagaimana disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 15 Target dan Realisasi Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan di PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan III			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan (Kapal)	618	598	763	127,59	123,46



Gambar 10 Grafik Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan di PPN Brondong Per Bulan

Tabel 16 Perbandingan Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan Lingkungan di PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025

Realisasi (Kapal)		Selisih (+/-) (Kapal)	%
TW III 2024	TW III 2025		
519	763	244	47

Berdasarkan tabel diatas, capaian IKU “Kapal Perikanan Izin Daerah yang Memenuhi Ketentuan” triwulan III tahun 2025 sebesar 763 atau 123,46% dari target yang ditetapkan sebesar 598. Pencapaian target pada triwulan III merupakan gabungan dari pencapaian target tahun 2023 sebesar 367 dan tahun 2024 sebesar 201. Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 519 maka capaian triwulan III 2025 mengalami kenaikan sebesar 244 atau 47%.

Pencapaian IKU tersebut, hal ini disebabkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi antara lain :

1. Pada tahun 2025 telah dilakukan optimalisasi perizinan dokumen kapal perikanan, sehingga seluruh kapal yang berpangkalan di PPN Brondong wajib melengkapi seluruh dokumen perizinan, termasuk sertifikat kelaikan

kapal.

2. Di Pelabuhan Perikanan Mayangan saat ini telah tersedia dua lokasi pelayanan kelaikan kapal, yaitu di PP Mayangan dan Gili Ketapang. Pada tahun sebelumnya, jumlah pengajuan sertifikat kelaikan kapal di wilayah tersebut masih relatif sedikit
3. Di PPP Ngemplakrejo, pengajuan pelayanan kelaikan kapal baru mulai dilakukan pada tahun ini, yang sebelumnya belum pernah ada pengajuan

Pelaksanaan pemeriksaan kelaikan kapal terkendala oleh jarak lokasi pelabuhan pangkalan yang cukup jauh dari PPN Brondong, sementara alokasi anggaran untuk kegiatan pengecekan di lapangan belum tercantum dalam DIPA karena kebijakan efisiensi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan penganggaran khusus untuk kegiatan pengecekan kelaikan kapal di lokasi pelabuhan pangkalan, agar pelaksanaannya dapat berjalan optimal serta mendukung peningkatan capaian kinerja secara berkelanjutan

IKS 04.2. Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan

Pemenuhan persyaratan bekerja awak kapal perikanan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata Kelola Pengawakan Kapal Perikanan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat pelaksanaan tatakelola Pengawakan Kapal Perikanan dengan menerbitkan surat edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.2541/MEN-KP/XII/2024 tentang Layanan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan dan Relaksasi Kebijakan Pemenuhan Persyaratan Kerja bagi Awak Kapal Perikanan pada Kapal Perikanan Berbendera Indonesia.

Pada triwulan III tahun 2025 capaian IKU “Tingkat Pemenuhan Persyaratan Bekerja Awak Kapal Perikanan” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode semesteran.

S.05 Terwujudnya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik di Lingkungan Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong

IKS 05.1. Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Zona Integritas (ZI) merupakan sebutan atau predikat yang diberikan kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen, yaitu pengungkit dan hasil. Komponen pengungkit merupakan aspek tata kelola (*governance*) internal unit kerja dan komponen hasil merupakan bagaimana stakeholder merasakan dampak/hasil dari perubahan yang telah dilakukan pada area pengungkit. Pelaksanaan pembangunan ZI di PPN Brondong ditetapkan dengan pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong melalui SK KPA. Pada triwulan III tahun 2025 IKU “Nilai PM Pembangunan ZI Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode tahunan.

IKS 05. 2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Tindak lanjut adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh auditan dalam rangka memperbaiki kelemahan pengendalian yang telah diidentifikasi oleh auditor dalam bentuk saran dan/atau rekomendasi dalam LHP. Tindak lanjut dalam hal ini diharapkan tidak sekedar sebagai wujud kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, namun yang lebih penting lagi adalah sebagai bentuk upaya peningkatan kinerja auditan yang menindaklanjuti. Hal tersebut dikarenakan, rekomendasi/saran yang diberikan dalam LHP adalah untuk perbaikan atas kelemahan manajemen maupun untuk peningkatan kinerja satker terkait, dengan demikian, ada korelasi antara pelaksanaan tindak lanjut dengan peningkatan kinerja yang diharapkan.

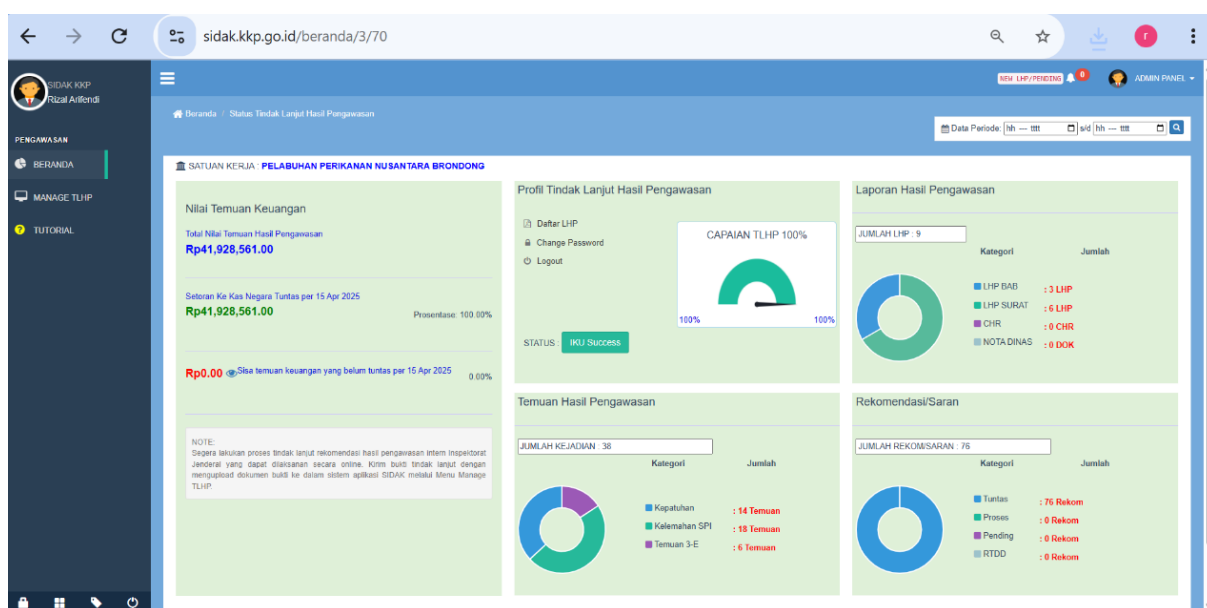
Berdasarkan Peraturan Irjen KKP Nomor 209/PER-IRJEN/2018, tentang Pedoman Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan/atau Pemeriksaan di lingkungan KKP, sebagaimana pada Pasal 20 PerMenKP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 tentang Pedoman Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bahwa auditor dan/atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemantauan tindak lanjut, guna mengetahui perkembangan penyelesaian tindak lanjut

hasil pengawasan. Disisi lain, pada Pasal 25 PERMENKP Nomor 29/PERMEN-KP/2014 disebutkan antara lain bahwa Auditi wajib menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal dalam waktu 30 hari kerja setelah laporan Pengawasan Intern diterima dengan dilengkapi bukti-bukti pendukungnya. Untuk itu, semestinya, sudah menjadi kewajiban auditi, tanpa dipantau pun harus melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen KKP.

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada Ditjen Perikanan Tangkap berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun bab) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan IV Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus proses dan/atau tuntas) oleh Ditjen Perikanan Tangkap yang menjadi objek pengawasan mencapai 100% berstatus tuntas ditindaklanjuti dan dimanfaatkan.

Tabel 17 Target dan Realisasi Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan III			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	85	85	100	117,65%	117,65%



Gambar 11 Dashboard Aplikasi SIDAK

Tabel 18 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan dengan periode sebelumnya

Realisasi (Persen)		Selisih (+/-) (Persen)	%
TW III 2024	TW III 2025		
100	100	0	0

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa pemanfaatan untuk perbaikan dari rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Triwulan III Tahun 2025 adalah 100% telah dilakukan tindak lanjut perbaikan. Capaian realisasi rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja PPN Brondong adalah 100% atau 117,65% dari target Triwulan III sebesar 85% dan sebesar 117,65% dari target tahun 2025 sebesar 85%. Dibandingkan capaian periode sebelumnya maka capaian Tahun 2025 adalah sama yaitu 100%.

Pencapaian IK “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2025 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu melakukan koordinasi secara intens secara internal dan eksternal terkait dalam menindaklanjuti terhadap rekomendasi hasil pengawasan. Dalam mempertahankan dan meningkatkan pemanfaatan hasil rekomendasi hasil pengawasan di PPN Brondong pada tahun 2025, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam progres tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan..
2. Membentuk tim khusus dalam rangka percepatan penyelesaian hasil pengawasan.

IKS 05. 3. Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab diperlukan pertanggungjawaban dari penyelenggara negara yang dilaporkan pada akhir tahun anggaran dalam suatu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah mengatur bahwa segala pelaksanaan pembangunan oleh instansi pemerintah agar dilaporkan secara aknutabel sesuai

dengan perjanjian kinerja yang ditetapkan meliputi pertanggungjawaban penggunaan anggaran, keberhasilan yang dicapai, kegagalan pelaksanaan serta permasalahan – permasalahan yang dihadapi yang disertai dengan tindak lanjut pelaksanaan di tahun mendatang. Tujuan dari pelaporan kinerja ini yakni : (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya tercapai; dan, (2) Menjadi dasar untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Pelaksanaan SAKIP pada PPN Brondong pada Tahun 2024 didasarkan oleh Surat Tugas Nomor B.14/PPNBR/KP.440/I/2024 tentang Penugasan Tim SAKIP Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong. Pengukuran kinerja SAKIP dilaksanakan menggunakan pedoman evaluasi yang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Triwulan III Tahun 2025 IKU “Nilai PM SAKIP Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode tahunan.

IKS 05.4. Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)

Menurut UU No 5 Tahun 2014, penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas salah satunya adalah profesionalitas. Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan birokrasi harus dapat mengikuti perkembangan organisasi yang kompetitif dalam rangka mewujudkan Aparatur Negara yang profesional. Profesionalitas ASN merupakan kunci keberhasilan ASN dalam melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa. Untuk mengetahui tingkat profesionalitas ASN diperlukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran

Indeks Profesionalitas ASN. Pengukuran indeks profesionalitas ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas ASN dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai standar profesionalitas ASN yaitu kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN diharapkan mampu memotret tingkat profesionalitas ASN pada Instansi Pemerintah dan ASN itu sendiri serta sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi ASN yang diharapkan mampu meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi.

Pada triwulan III tahun 2025, capaian IKU “Indeks Profesionalitas ASN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode semesteran.

IKS 05. 5. Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SiRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di (nama satker). Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan unit kerja mandiri. Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor

16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1).

Pada Triwulan III Tahun 2025, pengukuran capaian kinerja IK “Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” sebesar 100%.

Tabel 19 Realisasi Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP Tahun 2025

REKAPITULASI DATA HASIL PERHITUNGAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UNTUK PERSENTASE RENCANA UMUM PENGADAAN TRIWULAN 3 TAHUN ANGGARAN 2025 LINGKUP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kode E1	Nama Unit Eselon 1	Σ SATKER	Persentase RUP Terumumkan				% Target IKU TW 3	% Capaian Target IKU TW 3	Keterangan
			Pagu Pengadaan	Pagu Terumumkan	Selisih	Keterangan			
02	Inspektorat Jenderal	1	5,976,879,000	5,976,879,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
04	Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	16	1,132,182,915,103	1,132,182,915,103	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
13	Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	37	43,754,804,122	43,754,804,122	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
12	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan	42	875,549,848,134	875,549,848,134	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
06	Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan	2	51,933,565,281	51,933,565,281	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
03	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	24	5,976,879,000	5,976,879,000	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
05	Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	15	336,649,816,000	336,649,816,000	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
07	Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	9	1,081,158,327,186	1,081,158,327,186	-	Sesuai	80.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
01	Sekretariat Jenderal	3	342,443,130,996	342,443,130,996	-	Sesuai	76.00%	100.00%	Capaian Target Maksimal
	TOTAL	149	3,875,626,164,822	3,875,626,164,822				100.00%	

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap

NO	Nama_Satker	PAGU PENGADAAN TW-3			REKAP PAGU TERUMUMKAN (SIRUP) TW3			Selisih Pagu Pengadaan - Pagu Terumumkan TW3	% RUP TERUMUMKAN
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP		
C	Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap	454,445,909,663	2,825,805,000	457,271,714,663	454,445,909,663	2,825,805,000	457,271,714,663	-	100.00%
1	BALAI BESAR PENANGKAPAN IKAN SEMARANG	4,359,556,000	590,438,000	4,949,994,000	4,359,556,000	590,438,000	4,949,994,000	-	100.00%
2	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA AMBON	1,472,698,000	2,235,367,000	3,708,065,000	1,472,698,000	2,235,367,000	3,708,065,000	-	100.00%
3	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG	4,447,072,000		4,447,072,000	4,447,072,000		4,447,072,000	-	100.00%
4	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KARANGANTU	3,539,681,000		3,539,681,000	3,539,681,000		3,539,681,000	-	100.00%
5	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KEJAWANAN	437,742,234,663		437,742,234,663	437,742,234,663		437,742,234,663	-	100.00%
6	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA KWADANG	2,884,668,000		2,884,668,000	2,884,668,000		2,884,668,000	-	100.00%
7	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN	2,019,499,000		2,019,499,000	2,019,499,000		2,019,499,000	-	100.00%
8	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PELABUHAN RATU	3,915,697,000		3,915,697,000	3,915,697,000		3,915,697,000	-	100.00%
9	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEMANGKAT	2,200,792,000		2,200,792,000	2,200,792,000		2,200,792,000	-	100.00%
10	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PENGAMBENGAN	1,158,531,231,000		1,158,531,231,000	1,158,531,231,000		1,158,531,231,000	-	100.00%
11	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PRIGI	2,103,286,000		2,103,286,000	2,103,286,000		2,103,286,000	-	100.00%
12	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SIBOLGA	850,730,000	2,028,728,000	2,877,458,000	850,730,000	2,028,728,000	2,877,458,000	-	100.00%
13	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA SUNGAILIT	1,208,763,000	6,400,000	1,215,163,000	1,208,763,000	6,400,000	1,215,163,000	-	100.00%
14	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TANJUNG PANDAN	157,451,000	1,718,681,000	1,876,132,000	157,451,000	1,718,681,000	1,876,132,000	-	100.00%
15	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TERNATE	2,872,026,000		2,872,026,000	2,872,026,000		2,872,026,000	-	100.00%
16	PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL	1,941,647,000	37,642,000	1,979,289,000	1,941,647,000	37,642,000	1,979,289,000	-	100.00%
17	PELABUHAN PERIKANAN PANTAI TELUK BATANG	2,089,461,000		2,089,461,000	2,089,461,000		2,089,461,000	-	100.00%
18	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BELAWAN	3,959,917,000	2,672,013,000	6,541,930,000	3,959,917,000	2,672,013,000	6,541,930,000	-	100.00%
19	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BITUNG	59,399,619,000	31,000,000	59,399,619,000	59,399,619,000	31,000,000	59,399,619,000	-	100.00%
20	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA BUNGUS	2,358,509,000		2,358,509,000	2,358,509,000		2,358,509,000	-	100.00%
21	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA CILACAP	4,130,340,800		4,130,340,800	4,130,340,800		4,130,340,800	-	100.00%
22	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KENDARI	35,948,521,000		35,948,521,000	35,948,521,000		35,948,521,000	-	100.00%
23	PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA NIZAM ZACHMAN	15,847,989,000		15,847,989,000	15,847,989,000		15,847,989,000	-	100.00%
24	SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP	1,250,409,662,000	25,516,762,000	1,275,926,424,000	1,250,409,662,000	25,516,762,000	1,275,926,424,000	-	100.00%

Tabel 20 Target dan Realisasi Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan III			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di PPN Brondong (Persen)	76	76	100	131,58	131,58

Tabel 21 Perbandingan Target dan Realisasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa di PPN Brondong dengan periode sebelumnya

Realisasi (Persen)		Selisih (+/-) (Persen)	%
TW III 2024	TW III 2025		
-	100	-	-

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong adalah sebanyak 100 atau lebih besar dari target sebesar 76 sehingga persentase capain kinerja sebesar 131,58%. Indikator ini merupakan indikator yang ditetapkan pada Tahun 2025, sehingga tidak dapat dilakukan analisa perbandingan terhadap periode sebelumnya maupun jangka menengah.

Pencapaian IK “Tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tahun 2025 didukung oleh ketepatan identifikasi belanja pengadaan yang dituangkan ke dalam penyusunan kertas kerja sebagai data dukung pembentuk nilai pagu pengadaan yang selanjutnya dilakukan proses revisi RUP pada aplikasi SIRUP.

Dalam mempertahankan dan meningkatkan tingkat Rencana Umum Pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP di PPN Brondong, maka dilakukan upaya yaitu:

1. Peningkatan perencanaan terhadap pengadaan barang/jasa secara akuntabel.
2. Evaluasi berkala terhadap RUP yang telah diumumkan, guna memastikan keterpenuhan seluruh paket kegiatan dan mengidentifikasi potensi kekurangan.
3. Meningkatkan kompetensi pegawai dalam penyusunan RUP melalui diklat atau pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Mengintruksikan pejabat pengadaan untuk mempercepat finalisasi dan penginputan data RUP ke dalam SIRUP segera setelah data kegiatan tersedia dan memenuhi persyaratan teknis.

IKS 05. 6. Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) lingkup PPN Brondong merupakan salah satu kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi PPN Brondong dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/ permasalahan, dan bahkan menjadi

temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal. Pengukuran kepatuhan pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur sebagai berikut (1) tingkat pemanfaatan rencana kebutuhan BMN (RKBMN), (2) tersedianya usulan PSP BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST, (3) tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset), (4) penggunaan bmn hasil pengadaan belanja modal di dukung berita acara serah terima (BAST)/berita acara pemakaian, dan (5) penyusunan laporan BMN (semesteran dan tahunan) secara tepat waktu. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai.

Pada Triwulan III Tahun 2025 IKU “Persentase Pengelolaan BMN di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode tahunan.

IKS 05. 7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada Online Monitoring (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Pengukuran dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek meliputi (1) kualitas perencanaan anggaran, (2) kualitas pelaksanaan anggaran, dan (3) kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Jumlah indikator kinerja yang dilakukan pengukuran dalam IKPA sebanyak 8 (delapan) yaitu (1) revisi DIPA, (2) Deviasi halaman III DIPA, (3) data kontrak, (4) penyelesaian tagihan, (5) pengelolaan UP dan TUP, (6) dispensasi SPM, (7) penyerapan anggaran, dan (8) capaian output. Metode pengukuran capaian kinerja dengan membandingkan antara realisasi dengan target yang ditetapkan sehingga capaian dinyatakan tercapai jika realisasi lebih besar atau sama dengan target, dan bila realisasi lebih kecil maka kinerja tidak tercapai.

Pada triwulan III tahun 2025, capaian IKU “Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode semesteran.

IKS 05. 8. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Perlu menetapkan Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) atau biasa disebut Nilai Kinerja Anggaran (NKA) sebagai Indikator Kinerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (K/L) diperoleh dari penggabungan 50% nilai kinerja perencanaan anggaran dan 50% nilai kinerja pelaksanaan anggaran.

- Nilai Kinerja Anggaran > 90 persen sampai dengan 100 persen dikategorikan Sangat Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 80 persen sampai dengan 90 persen dikategorikan Baik;
- Nilai Kinerja Anggaran > 60 persen sampai dengan 80 persen dikategorikan Cukup atau Normal;
- Nilai Kinerja Anggaran > 50 persen sampai dengan 60 persen dikategorikan Kurang;
- Nilai Kinerja Anggaran sampai dengan 50 persen dikategorikan Sangat Kurang;

Pada Triwulan III Tahun 2025 IKU “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)” tidak dilakukan pengukuran karena dilakukan periode tahunan.

IKS 07. 9. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)

Survei Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik dan untuk mengetahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing. Hasil penilaian Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong Triwulan III Tahun 2025 sebagai berikut :

Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan III tahun 2025 lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Unit Pelayanan Publik	Jumlah Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Hasil SKM
BBPI Semarang	60	3,800	3,850	3,767	3,717	3,833	3,700	3,750	3,817	3,750	94,40
Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	279	3,753	3,735	3,746	3,763	3,756	3,688	3,720	3,720	3,742	93,40
Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan	5	4,000	3,800	4,000	4,000	3,800	4,000	3,800	4,000	4,000	98,33
Direktorat Usaha Penangkapan Ikan	94	3,638	3,617	3,585	3,574	3,574	3,553	3,564	3,596	3,606	89,75
PPN Ambon	164	3,762	3,732	3,665	3,677	3,713	3,854	3,854	3,799	3,817	94,09
PPN Brondong	126	3,794	3,778	3,754	3,786	3,706	3,675	3,698	3,683	3,714	93,30
PPN Karangantu	203	3,704	3,680	3,704	3,803	3,734	3,704	3,759	3,611	3,502	92,23
PPN Kejawan	159	3,824	3,843	3,811	3,761	3,786	3,805	3,830	3,767	3,730	94,88
PPN Kwandang	243	3,840	3,794	3,811	3,753	3,782	3,691	3,778	3,840	3,794	94,67
PPN Palabuhanratu	141	3,887	3,858	3,851	3,837	3,801	3,773	3,816	3,773	3,759	95,43
PPN Pekalongan	106	3,858	3,830	3,830	3,783	3,774	3,830	3,868	3,698	3,670	94,84
PPN Pemangkat	178	3,871	3,848	3,860	3,904	3,798	3,865	3,848	3,865	3,831	96,36
PPN Pengambangan	125	3,784	3,752	3,792	3,728	3,768	3,720	3,736	3,728	3,680	93,58
PPN Prigi	146	3,767	3,774	3,740	3,692	3,726	3,664	3,740	3,664	3,664	92,87
PPN Sibolga	203	3,739	3,724	3,734	3,690	3,690	3,680	3,709	3,700	3,734	92,78

Gambar 12 Hasil Penyelenggaraan SKM Triwulan III Tahun 2025 Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap

Tabel 22 Target dan Realisasi Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025

Nama IKU	Target 2025	Triwulan III			% Terhadap Realisasi 2025
		Target	Realisasi	%	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	88,50	88,50	93,30	105,42	105,42

Tabel 23 Perbandingan Persentase Rekomendasi Hasil Penyelenggaraan SKM

Realisasi (Rp) (Indeks)		Selisih (+/-) (Indeks)	%
TW III 2024	TW III 2025		
94,72	93,30	-1,42	-1

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai survei kepuasan masyarakat di PPN Brondong triwulan III tahun 2025 sebesar 93,30 atau 105,42% dari target yang ditetapkan sebesar 88,50. Bila dibandingkan dengan realisasi triwulan III tahun 2024 yaitu sebesar 94,72 maka capaian tingkat kinerja PPN Brondong triwulan III tahun

2025 mengalami penurunan sebesar -1,42 atau -1 %.

Pencapaian IK “Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong” triwulan III tahun 2025 didukung oleh beberapa langkah-langkah operasional yaitu adanya peran aktif para pengguna jasa sebagai responden dan proaktif para petugas dalam melakukan pendampingan pengisian kuisioner SKM melalui aplikasi Susan KKP. Dalam mempertahankan dan meningkatkan capaian SKM yang berkualitas di PPN Brondong, maka dilakukan upaya yaitu penyusunan tim SKM lingkup PPN Brondong dan melakukan perbaikan pada pelayanan di PPN Brondong.

3.2. Realisasi Anggaran

PPN Brondong pada triwulan III tahun 2025 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.058.405.000,- dengan realisasi belanja pada sebesar Rp. 9.584.014.653,- atau 63,65%. Rincian realisasi anggaran PPN Brondong pada triwulan III tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 24 Realiasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan PPN Brondong Triwulan III Tahun 2025

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	(%)
2338 Pengelolaan Pelabuhan Perikanan	1.086.708.000	63.789.611	5,87
2341 Pengelolaan Sumber Daya Ikan	38.689.000	1.680.000	4,34
2342 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	13.933.008.000	9.518.545.042	68,32
Total	15.058.405.000	9.584.014.653	63,65

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja PPN Brondong pada Triwulan III Tahun 2025 melalui pencapaian target indikator kinerja yang diinput dalam Sistem Pengelolaan Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KINERJAKU), diperoleh Nilai Pengukuran Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 115,32 % kategori **Istimewa**. Dengan tercapainya seluruh target IKU dan IKM pada Triwulan III Tahun 2025, diharapkan upaya optimalisasi tetap dilakukan melalui inovasi kegiatan baru dan peningkatan kreativitas agar capaian dapat dipertahankan dan ditingkatkan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah PPN Brondong menjadi wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran program dan mengukur sejauh mana SAKIP telah diimplementasikan. Berbagai perbaikan mendasar telah dilakukan, meliputi perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi kinerja, serta pencapaian sasaran organisasi.

EVALUASI RENCANA AKSI
PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA BRONDONG
PERIODE TRIWULAN III
TAHUN 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Unit PJ	Kegiatan Pendukung	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Target Kegiatan	Satuan Target Kegiatan	Target Kegiatan Berkala												Realisasi Kegiatan Berkala												Tindak Lanjut
								Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	t	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	t	Sept	Okt	
	15	Persentase Pengelolaan BMN Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Persen)	Tim Kerja Dukungan Manajemen	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.470.763.000	3.015.041.279	1	Layanan																								
	16	Nilai IKPA Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Tim Kerja Dukungan Manajemen	Pelaporan keuangan lingkup Ditjen Perikanan Tangkap	43.664.000	42.604.000	1	Layanan																								
				Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran	9.451.000	9.450.600	1	Layanan																								Tidak ada
	17	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Nilai)	Tim Kerja Dukungan Manajemen	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Ditjen Perikanan Tangkap	0	0	1	Layanan																								
	18	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong (Indeks)	Tim Kerja Dukungan Manajemen	Pelaksanaan tata kelola dan operasional perusahaan di pelabuhan perikanan	0	0	1	Lembaga																								Melakukan sosialisasi kepenguna jasa pentingnya perannya dalam mengisi SKM



Brondong, 15 Oktober 2025
Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong,